

Analisis Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Tahun 2018-2022

Dermawati Sitanggang¹, Grace Yosia Ambarita², Rizky Fadly³

Universitas Negeri Medan, Medan

*Correspondence: E-mail: graceyosia393@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of inflation and unemployment on the poverty rate in North Sumatra in 2018-2022. The data used in this study comes from the North Sumatra Province Central Bureau of Statistics and is a cross section or time series data. The model used in this research is a multiple linear regression model by testing autocorrelation, multicollinearity, normality, heteroscedasticity, F test, T test and coefficient determination test (R²). The estimation results show that inflation has a negative and significant effect on the poverty rate in North Sumatra province in 2018 - 2022. This means that if inflation increases, poverty in North Sumatra will decrease. The Unemployment variable has a negative and insignificant effect on Poverty in the province of North Sumatra in 2018 - 2022. Which means if unemployment increases it will reduce the poverty rate in North Sumatra

Keywords: Inflation, Unemployment, Poverty Levels

Introduction

Kemiskinan menurut World Bank tahun 2004, kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Penduduk yang dapat dikatakan miskin adalah yang pendapatannya di bawah US\$ 1 per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah US\$ 2 per hari.

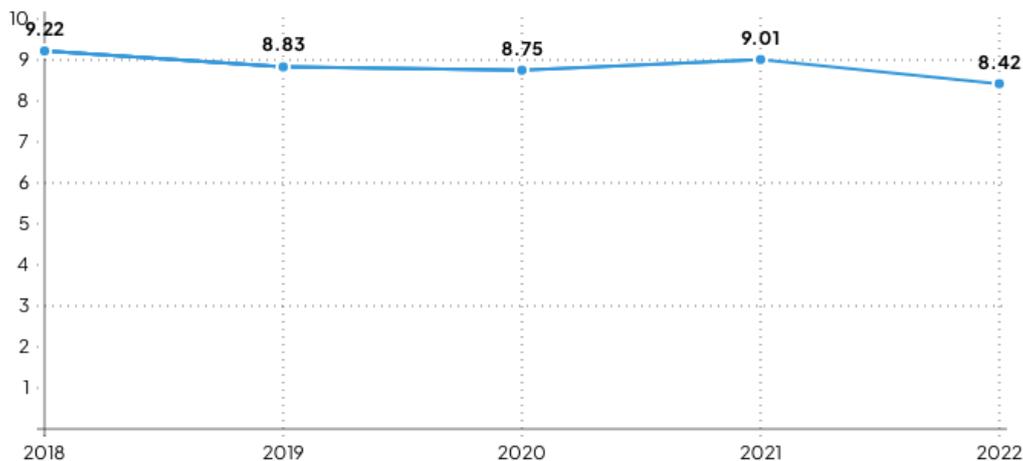
World Bank mendefinisikan kemiskinan itu sendiri adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Menurut Nasikun dalam Ginanjar Kartasmita, kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar.

Menurut Quibria dalam Adit Agus Prasetyo mengatakan, Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam suatu kondisi yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yakni kebutuhan pangan, pakaian dan tempat tinggal, dengan asumsi bahwa konsep kemiskinan ini bersifat time and society-specific, artinya tidak berlaku universal karena konkret masing-masing masyarakat, kurun waktu memiliki ukuran yang berbeda tentang kemiskinan.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun minuman. Sedangkan menurut Bradly dan Schiller dalam Hendra Wahyudi dan Sismudjito “kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas.

Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2018–2022



Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara berfluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan sebesar 9,22%, 2019 sebesar 8,83% hingga tahun 2020 mencapai 8,75%, namun persentase tersebut mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021 sebesar 9,01% dan mulai menurun lagi pada tahun 2022 sebesar 8,42%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dapat disebabkan oleh banyak faktor terutama dimasa pandemi yang menimbulkan banyak penurunan yang mengakibatkan banyak dampak negatif kepada masyarakat. Salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh banyak perusahaan, PHK tersebut berujung kepada pengangguran sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berakar pada berbagai sektor dan kondisi (Panji, 2016 dalam Aristina, 2017). Bagi masyarakat miskin, pemenuhan hak dasar atas pekerjaan yang layak ditentukan dari ketersediaan lapangan kerja yang dapat diakses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, serta melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja. Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan (Astrini, 2013 dalam Aristina, 2017). Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Ashcroft dan David, 2008 dalam Aristina, 2017).

Pengangguran dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya keterampilan dan pengangguran menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik (Nanga, 2005 dalam Aristina, 2017). Pengangguran adalah masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Menurut BPS pada sensus 2010, pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja (15- 64) tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Kajian Pustaka

1. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan menurut Mandala Manurung (Kasim, 2021) pengertian Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Menurut Adi Warmankarim secara umum Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas atau jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap

sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga barang naik secara terus menerus. Kenaikan harga-harga barang bersifat menyeluruh, jika hanya beberapa jenis barang saja maka tidak dikatakan inflasi kecuali jika kenaikan harga satu barang meluas dan berimbas pada kenaikan barang-barang lainnya (Boediono, 2008 dalam) (Khairil, 2018). Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat yang selama ini memiliki pendapatan tetap, juga dapat mengurangi nilai kekayaan masyarakat seperti uang simpanan di bank dan uang tunai yang dimiliki (Sukirno, 2013: 339) (dalam Khairil, 2018).

Dari beberapa pengertian Inflasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda.

2. Pengangguran

Mankiw (2006:154) (dalam Khairil, 2018) mengatakan bahwa pengangguran merupakan permasalahan makro ekonomi yang mempengaruhi masyarakat secara langsung dan menjadi masalah yang paling berat. Menurut Sukirno (2000: 474) (dalam Khairil, 2018). Pengangguran ialah masyarakat yang sudah masuk kedalam usia produktif atau usia kerja dan tergolong sebagai angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan sedang mencari kerja. Pengangguran menurut Sri Hermuningsih dikutip dari Deni Tisna, “pengangguran di definisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (labor forcé) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan dan mereka inginkan”.

Menurut BPS pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran didefinisikan adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak diperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004). Pengangguran dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Sukirno (2010) (dalam Khairil, 2018), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

- 1) Pengangguran friksional, yaitu para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.
- 2) Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran ini terjadi sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar.
- 3) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.
- 4) Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia dengan mesin-mesin dan bahan kimia.

3. Kemiskinan

Supriatna (1997) (dalam Khairil, 2018) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi serba terbatas pada suatu kelompok masyarakat yang terjadi bukan atas keinginan kelompok masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tergolong miskin ditandai dengan pendapatan yang rendah, kurang produktif, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas serta kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No, 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

4. Hubungan antara Inflasi dengan Penduduk Miskin

Menurut penelitian Desrini Ningsih (2018), variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil ini didukung dengan adanya teori bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan.

5. Hubungan antara Pengangguran dengan Penduduk Miskin

Hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Sukirno (2004) menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Yang memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan pula

Hypotheses Development

Kemiskinan adalah masalah lintas zaman, kenyataan ini kiranya menjadi latar belakang mengapa kemiskinan selalu menjadi masalah yang mendapatkan perhatian besar dan mengundang perdebatan. Namun terlepas dari semua kontroversi perdebatan yang ada tentang konsep kemiskinan, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan setiap kebijakan yang dibuat harus memihak kepada rakyat miskin yang sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak. Kemiskinan terjadi karena rendahnya standart hidup orang-orang miskin yang berakibat pada buruknya angka harapan hidup dan pendidikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satunya adalah pengendalian laju inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terus menerus. Jika yang naik hanya satu barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi harga barang lain. Dengan meningkatnya tingkat inflasi menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal ini terjadi karena pada umumnya pendapatan masyarakat yang rendah. Keadaan ini akan menjadi lebih parah lagi apabila diikuti pula dengan tingginya tingkat pengangguran. Saat ini pengangguran bukan hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan juga menjadi masalah sosial dan politik. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, baik berupa perampokan, pencurian maupun perdagangan ilegal. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi, minimal kebutuhan pokok. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rezki Mardiatillah (dkk), 2021 menyimpulkan bahwa variabel Inflasi dan Pengangguran mempunyai pengaruh 95,6 % signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara

H2 : Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara

H3 : Inflasi dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2018-2022

Method

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2018-2022. Sesuai dengan judulnya, peneliti melakukan penelitian dengan metode kuantitatif dengan kemiskinan menjadi variabel dependen dan dua variabel Independen atau variabel yang mempengaruhi yaitu inflasi dan pengangguran. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data cross section atau data time series dari tahun 2018-2022 yang bersumber dari badan pusat statistik provinsi Sumatera Utara. Adapun model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan menguji dari beberapa aspek seperti uji autokorelasi, multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji lain. Model dibangun pada persamaan regresi sebagai berikut

$$Y(K) = \alpha - b_1X_1(PE) + b_2X_2(TPT) - b_3X_3(IPM) + e$$

Dimana

Y(K) = Kemiskinan

X1 = Inflasi

X2 = Pengangguran

Results And Discussion

Result

Table 1
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.
Constant	2.393298	30.96194	0.0010
Inflasi	-0.047092	-7.293502	0.0183
Pengangguran	-0.099309	-2.309900	0.1471
R ²	0.968337		
F statistics	30.58284		
AutoKorelasi			0.0278
Normalitas			0.877538
Heteroskedastisitas			0.0997
Uji Multikolinieritas		VIF	
Inflasi			1.004846
Pengangguran			1.004846

Source: Eviews10 (diolah penulis, 2023)

Discussion

Berdasarkan nilai koefisien dari olah data uji regresi diatas dapat dibuat persamaan model regresi sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 2.393298 - 0.047092 (\text{Inflasi}) - 0.099309 (\text{Pengangguran})$$

Persamaan model regresi tersebut dapat diinterpretasi bahwa percobaan estimasi dilakukan terhadap variabel yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, seperti inflasi dan pengangguran. Hasil estimasi yang signifikan diberikan oleh variabel Inflasi.

Inflasi

Inflasi memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan bermakna bahwa setiap peningkatan inflasi 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.047092 persen di Sumatera Utara. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara inflasi dengan kemiskinan. Adapun hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Amalia, 2018) bahwa inflasi berpengaruh negative terhadap kemiskinan di wilayah perdesaan Provinsi Lampung. Inflasi

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dalam penelitian (Kharie, 2007) bahwa inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti perbaikan distribusi pendapatan diantara kelompok penerima pendapatan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pengeluaran konsumsi perkapita, sehingga disaat inflasi naik daya beli masyarakat tidak akan turun dan tingkat kemiskinan disuatu wilayah dapat berkurang.

Pengangguran

Pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan bermakna bahwa setiap peningkatan inflasi 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.099309 persen di Sumatera Utara. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara inflasi dengan kemiskinan. Adapun hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Gabriella, 2022) bahwa variabel pengangguran menunjukkan serta memperlihatkan adanya tanda yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan juga dengan penelitian Padli, (2021) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negative dan juga berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Padli, (2021) tidak semua pengangguran itu miskin, dikarenakan Pengangguran terbuka sendiri memiliki beberapa definisi, misalnya individu yang sedang mencari pekerjaan, penghuni yang sedang bersiap-siap untuk organisasi namun tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak dapat menemukan jalur pekerjaan baru, dan individu yang sedang mencari pekerjaan.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan Jarque Berra dengan tingkat alfa 0,05. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probability 0.877538. Hal ini menunjukkan bahwa $prob > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch Godfrey untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi. Apabila nilai probability lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas chisquare sebesar 0.0278, artinya $prob <$ dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Semakin besar nilai VIF maka perkara multikolinearitas semakin serius. Aturan yang dipakai adalah jika $VIF > 10$ dan $2 > 0,90$ bisa dipastikan bahwa variabel mempunyai kolinearitas tinggi. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari VIF bahwa variabel Inflasi sebesar 1.004846 dan Pengangguran sebesar 1.004846. Ini berarti kedua variabel bebas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai $VIF < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji Multikolinieritas atau tidak ada yang mengandung masalah kolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Jika nilai $Prob. Obs*Rsquared > 0.05$, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada model penelitian ini diketahui bahwa $Prob.$ sebesar $0.0997 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

Uji F (Uji signifikan simultan)

Nilai F-hitung sebesar 30.58284 dengan probability F-statistik $0.031663 < 0,05$ yang berarti secara serempak variabel-variabel bebas (Inflasi dan Pengangguran) berpengaruh terhadap variabel terikat Tingkat kemiskinan. Hasil perhitungan perkiraan telah lulus tes kecocokan model pada uji serempak, jadi hasil perkiraan bisa dipakai dalam analisis.

Uji t (Uji parsial)

Uji parsial disebut juga uji tingkat-penting (significance's test). Untuk menguji hipotesis, dapat dilakukan dengan menggunakan hasil analisis data dengan uji t atau uji secara parsial. Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai t-hitung variabel Inflasi sebesar -7.293502 dan dengan nilai kemungkinan sebesar 0.0183 lebih kecil dari $\alpha = 0,10$, artinya bahwa variabel Inflasi signifikan mempengaruhi variabel Tingkat kemiskinan; variabel Pengangguran dengan nilai t statistik sebesar -2.309900 dan dengan nilai kemungkinan sebesar 0.1471 lebih besar dari $\alpha = 0,10$, yang artinya bahwa variabel TPT tidak signifikan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui nilai R-squared (R²) sebesar 0.968337 sehingga nilai Koefisien Determinasi sebesar 96,8337% maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan keeratan korelasi yang sangat kuat antara variabel independen Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2018-2022. Hasil tersebut menunjukkan kedua variabel bebas mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 96,8337 % dan sisanya 3,1663 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Secara parsial Inflasi dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022.
2. Secara simultan, variabel X yaitu PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2022.
3. Variabel X1 (Inflasi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022. Yang berarti jika Inflasi meningkat, maka Kemiskinan di Sumatera Utara akan menurun.
4. Variabel X2 (Pengangguran) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022. Yang berarti jika pengangguran meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Aristina, ita & dkk. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. Jurnal ekonomi pembangunan. Vol. 6, No. 5. ISSN: 2303-0178.

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/15695/1/67bbde3e33901396f12a48de9d8129f8.pdf>

Cokrowidagdo. (2017). Pengaruh tingkat inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Jawa Timur.

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4105>

Eka Agustina, dkk. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 4, No. 2. ISSN. 2502-6976.

Susanto Andrawina (2019). Hubungan Negatif Antara Tingkat Inflasi dengan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perdesaan Provinsi Lampung. Vol. 19 No. 1, 63 – 69

Padli. (2021). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013. 4(1), 1–23.

Gabriella, Agus (2022). Pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Volume 19 Issue 2 (2022) Pages 467-477

World Bank. (2019). *Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle*. World Bank Group.